

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi pandangan dunia bahwa makin maju suatu masyarakat makin tinggi tuntutan terhadap pendidikan minimal yang diikuti warganegaranya. Berbagai negara maju yang semula menetapkan Pendidikan Dasar 10 tahun menjadi 12 Tahun (Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang). Hal ini dilakukan karena didalam suatu masyarakat yang maju dituntut persyaratan kepada para warganya untuk memiliki kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai. Makin maju masyarakat makin rumit peraturan hukum yang dilaksanakan, makin tinggi persyaratan kerja, makin luas pergaulan antar manusia, dan makin meningkat persyaratan hidup pada umumnya. Untuk itu setiap warga masyarakat dituntut untuk dapat "*survive*", dapat meningkatkan mutu kehidupan, dan dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan jaman melalui proses belajar sepanjang hayat. Di samping itu berbagai penemuan menunjukkan bahwa makin lama seseorang mengikuti pendidikan akan makin meningkat juga kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan makin meningkat juga produktivitas kerjanya. Karena itu dengan kemajuan pembangunan nasional di dalam dunia yang makin menjadi global, pendidikan dasar 6 tahun tidak mungkin mampu memberikan bekal bagi para warganegaranya untuk dapat "*survive*", dapat meningkatkan mutu kehidupan, dan mampu terus belajar sepanjang hayat. Untuk itu adalah sangat bijaksana bahwa pemerintah merancang dilaksanakannya Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan nasional serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta usaha pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang.

Sebagai perwujudan cita-cita nasional tersebut telah diterbitkan Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sstem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan tamatan pendidikan dasar (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 2003).

Sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam dan oleh keluarga, termasuk pendidikan agama, nilai budaya, nilai susila, dan norma perilaku.

Pendidikan dasar adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pendidikan dasar merupakan program pendidikan enam tahun di sekolah dasar (SD) dan program pendidikan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik memenuhi syarat mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta pengetahuan dan keterampilan dasar untuk dapat hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan dasar (*basic education*) tidak sama dengan sekolah dasar (*primary elementary school*). Pendidikan dasar dapat diartikan sebagai pendidikan minimum yang diwajibkan untuk diikuti oleh setiap warga negara suatu pemerintahan yang berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan untuk hidup layak sebagai warga negara dan pertimbangan harga diri suatu bangsa. Pendidikan dasar merupakan pendidikan massa (Mass Education atau Education For All) yang wajib diikuti oleh setiap warga negara dalam kelompok usia tertentu (*compulsory education*) yang merupakan cerminan "*political will*" suatu bangsa (Jam'an Satori, 1995).

Pendidikan dasar di Indonesia diartikan sebagai pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang

sederajat. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (PP No. 20 Tahun 2003).

Untuk penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 tahun, tentunya diperlukan suatu koordinasi sebab dalam pengelolaan program yang bersifat nasional keadaannya lebih kompleks. Salah satu pendekatan dalam administrasi adalah perlu keterpaduan yang didasarkan kepada norma dan keadaan yang berlaku, dalam berbagai dimensi: pemerintah, swasta, pengusaha, tenaga kerja, pendidik, ilmuwan, politikus, ulama dan sektor lainnya. Atas dasar itu diperlukan adanya keterpaduan pemikiran dan lain sebagainya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tanpa adanya suatu koordinasi maka administrasi atau manajemen tidak akan berfungsi dengan baik (Terry, 1962).. oleh karena itu, sangat tepat upaya pemerintah mengatur kepentingan tersebut melalui PP. No. 6 Tahun 1988. salah satu pasalnya menjelaskan tentang makna koordinasi, ialah:

Ada tiga macam koordinasi, yakni koordinasi fungsional, koordinasi instansional, dan koordinasi teritorial.

- 1) Koordinasi fungsional yaitu koordinasi antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.
- 2) Koordinasi instansional yaitu koordinasi terhadap beberapa instansi mengenai satu urusan tertentu yang bersangkutan

3) Koordinasi teritorial yaitu koordinasi terhadap dua atau lebih variabel wilayah dengan program tertentu.

Atas dasar itu tersebut di atas maka koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengintegrasikan, menyerasikan dan menyeleraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama-sama. Koordinasi perlu dilaksanakan mulai dari proses kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya.

Dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Dinas, Badan dan Lembaga mempunyai fungsi:

- a. Mengidentifikasi kaitan dan kepentingan antara instansi, baik fungsional, struktural maupun regional.
- b. Memadukan dan menyerasikan kegiatan pendidikan yang terkait yang dilakukan oleh berbagai instansi
- c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan tugas instansi terkait dengan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar
- d. Menyusun laporan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di daerah
- e. Memberi petunjuk umum dan petunjuk pelaksanaan kepada instansi pelaksana wajib belajar pendidikan dasar.

Acuan dasar termaksud merupakan landasan untuk ditindak lanjuti. Salah satu wujud pelaksanaan tindak lanjut yaitu instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun, yang disusul oleh keputusan

Menteri Koordinasi Bidang Kesra No. 18/Kep/Menko/Kesra/X/1994. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa “pelaksanaan koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun dilaksanakan oleh Tim Koordinasi”.

Tim Koordinasi Wajar dikdas 9 Tahun yang dibentuk mulai di tingkat pusat dan wilayah, terdiri dari berbagai instansi terkait dengan Departemen Pendidikan Nasional sebagai leading sektor. Pelaksanaan program, tentunya diperlukan suatu komunikasi, interaksi, serta peran serta secara teratur dan diperlukan suatu iklim organisasi yang sehat. Sebagai gambaran hasil perolehan program Wajar Dikdas 9 Tahun, sampai dengan 2003/2004 di Propinsi Banten menggunakan salah satu tolak ukur keberhasilan, yaitu angka partisipasi penduduk usia 13 sampai 15 tahun di SLTP/ sederajat. Hal ini dikenal sebagai hal angka partisipasi Kasar (APK.GER) dan Angka Partisipasi Murni (APM/NER).

Keberhasilan pencapaian program tersebut diindikasikan dengan tercapainya target Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD dan SLTP minimal sebesar 85% artinya 85% penduduk usia 7-12 untuk tingkat SD dan 13-15 untuk tingkat SLTP bisa turut serta dalam kegiatan belajar mengajar melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Pencapaian angka partisipasi murni (APM) tingkat SD di Propinsi Banten pada tahun 2004 sebesar 90,20% sehingga masuk dalam kategori tuntas. Sementara itu pencapaian target Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP sebagai indikator keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, dari tahun ke tahun tidak sesuai dengan harapan, baik dalam skala nasional maupun regional. Propinsi Banten pada tahun 2004 menargetkan pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP sebesar 65,82% sedangkan realisasinya

hanya mencapai angka 52,54%. Untuk lebih jelasnya mengenai target dan pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP di Propinsi Banten dapat dilihat dalam tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Rata-rata APK dan APM (Usia 13-15 Th) Propinsi Banten Tahun 2002-2003

No	Kab/Kota	Usia 13-15 Th	Siswa SLTP/MTs		Siswa Paket B	APK%	APM%
			Seluruhnya	13-15 Th			
1	Serang	118.012	75.078	59.901	1.441	57.44	50.10
2	Pandeglang	72.422	44.221	37.552	1.122	60.34	50.32
3	Lebak	64.680	30.567	9.434	621	55.50	14.70
4	Tangerang	181.442	124.620	106.503	2.066	60.80	55.40
5	Kt. Tangerang	64.242	64.415	42.034	433	91.00	70.15
6	Kt. Cilegon	32.380	17.140	15.840	520	55.10	51.75
		452.598	365.404	282.052	6.513	60.45	50.40

Sumber: DINAS PENDIDIKAN PROP. BANTEN

Tabel. 1.2. Rata-rata APK dan APM (Usia 13-15 Th) Propinsi Banten Tahun 2003-2004

No	Kab/Kota	Usia 13-15 Th	Siswa SLTP/MTs		Siswa Paket B	APK%	APM%
			Seluruhnya	13-15 Th			
1	Serang	120.008	76.099	61.804	1.960	63.41	51.50
2	Pandeglang	73.438	46.029	39.625	1.553	62.68	53.96
3	Lebak	66.791	32.895	10.468	805	49.25	15.67
4	Tangerang	183.559	126.460	108.151	2.587	68.89	58.92
5	Kt. Tangerang	67.164	66.616	48.138	550	99.19	71.67
6	Kt. Cilegon	33.638	19.245	17.884	610	57.21	53.17
		544.598	367.344	284.070	8.065	67.45	52.54

Sumber: DINAS PENDIDIKAN PROP. BANTEN



Berbagai hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan pencapaian target Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP, sebagai indikator keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Propinsi Banten. Salah satu penyebab yang mempengaruhi kegagalan program adalah kurangnya koordinasi antara dinas, badan, dan lembaga yang diberi tanggung jawab, sehingga terjadi kekurangan efektifitas pelaksanaan program.

Dalam konteks administrasi, koordinasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang dapat berperan penting bagi terciptanya kejelasan dari gerak organisasi, agar organisasi dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan secara efektif. Melalui koordinasi, pembagian pekerjaan dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi satu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefektif mungkin.

Dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun di Propinsi Banten secara empirik, masalah utama yang dihadapi adalah terletak pada :

- 1) Kelemahan koordinasi baik tingkat propinsi, Kabupaten, maupun Kecamatan;
- 2) Kelemahan akurasi, konsistensi, pengolahan dan analisis, serta pemahaman data dasar utama bagi perencanaan dan pengembangan sistem informasi wajar Dikdas;
- 3) Keterbatasan tenaga guru terutama guru bidang studi SLTP dan penyebaran guru SD;
- 4) Kurangnya penyediaan fasilitas dan daya tampung SLTP serta penyediaan sarana dan perangkat pendukung;

- 5) Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah untuk sebagian masyarakat;
- 6) Keterbatasan dan atau ketiadaan sumber dana khusus (dari Pemda) untuk mendukung Wajar Dikdas;
- 7) Kekurangan pemahaman akan kebutuhan khusus anak-anak usia sekolah di daerah terpencil;
- 8) Keterjangkauan lokasi sekolah dihubungkan dengan pemukiman, sebaran penduduk yang tidak merata, dan sarana transportasi masih terbatas.

Kemudian hal yang cukup berperan dan dirasakan dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun di propinsi Banten secara empirik yaitu belum harmonisnya sistem koordinasi, terutama, (1) Pengumpulan data; (2) Pelaksanaan rapat-rapat; (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; (4) Pengaturan sarana dan prasarana; (5) Pengaturan biaya.

Kemudian dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun, penulis mengangkat teori partisipasi yang dikemukakan oleh Hoofstede (1992:124-125), terdapat tiga hal pokok, yaitu:

1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi
2. Partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok
3. Partisipasi merupakan tanggung jawab terhadap kelompok

Kemudian menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 54, yaitu :

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan



organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

2. Masyarakat dapat berperan seras sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Dari penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah kontribusi koordinasi antar instansi/lembaga penyelenggara kependidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, di Propinsi Banten.

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan dalam latar belakang, dapat dikemukakan yang menjadi pernyataan masalah (*problem Statement*) penelitian ini adalah: "Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan partisipasi masyarakat belum sesuai harapan, disebabkan kurangnya intensitas koordinasi dari dinas, badan, lembaga serta partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dalam upaya penuntasan Wajar Dkdas 9 Tahun."

Berdasarkan pada pernyataan masalah tersebut penulis dapat mengemukakan rumusan masalah penelitian yaitu "Apakah ada kontribusi koordinasi antar instansi lembaga penyelenggaraan kependidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Propinsi Banten" dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah ada kontribusi kejelasan wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
2. Apakah ada kontribusi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

3. Apakah ada kontribusi komunikasi terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
4. Apakah ada kontribusi kemampuan pimpinan terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
5. Apakah ada kontribusi partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

C. Tujuan Penelitian/Studi

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Adanya kontribusi kejelasan wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun.
2. Adanya kontribusi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun
3. Adanya kontribusi komunikasi terhadap pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun
4. Adanya kontribusi kemampuan pimpinan terhadap pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun
5. Adanya kontribusi partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

D. Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Koordinasi

Setiap bentuk organisasi tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan koordinasi, karena koordinasi merupakan salah satu prinsip unsur kegiatan esensial organisasi, salah satu fungsi manajemen dan salah satu unsur dinamik administrasi. Karena itulah koordinasi dikelompokkan ke dalam salah satu fungsi organik, yaitu fungsi yang murlak harus dijalankan oleh administrasi dan manajemen. Menurut Siagian (1995:102) ketidakmampuan menjalankan fungsi koordinasi akan mengakibatkan lambat atau cepat matinya organisasi.

Mc. Farland (1965:385) berpendapat bahwa *"coordination is the process where by an executive develops as orderly patterns of group efforts among his subordinates and secures unity of action in the persuit of common purpose"*. Pendapat itu mengandung maksud bahwa koordinasi adalah proses yang pimpinan mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya dan kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama.

Adapun yang dimaksud dengan koordinasi menurut Djawin (Westra,1989:239). adalah suatu usaha kerjasama antara badan atau instansi atau unit dalam pelaksanaan tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling pengertian. saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Adapun Westra (1989:100) mengemukakan pengertian koordinasi itu adalah:

"Suatu pengertian yang terkandung didalamnya aspek-aspek tidak terjadi percecokkan, kekembaran atau kekosongan kerja, sebagai akibat dari pekerjaan menghubungkan-hubungkan, menyatu padukan dan menyelaraskan orang-orang satuan-satuan kerja dan pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada pencapai tujuan".

Koordinasi sebagai salah satu azas organisasi mempunyai arti penting dalam rangka proses pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Stoner (Dann Sugandha, 1991:12) bahwa yang dimaksud dengan koordinasi adalah proses penyatu paduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dari pendapat tersebut terkandung satu pengertian bahwa dengan satu koordinasi yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. seperti yang disampaikan oleh Dann Sugandha (1991:46) bahwa: keuntungan adanya koordinasi sebenarnya adalah terciptanya sinergi yang diperolehnya hasil kerjasan yang lebih besar dari jumlah hasil individual kalau masing-masing individu bekerja sendiri-sendiri. Jadi koordinasi akan menciptakan sinergi dalam arti terciptanya perpaduan usaha dari berbagai orang unit atau organisasi yang menghasilkan output yang lebih besar.

Implementasi koordinasi bagi setiap organisasi mempunyai manfaat yang sangat besar, apalagi mencakup program lintas sektoral seperti program Wajar Dikdas 9 tahun. Keselarasan dan kesamaan tindakan untuk menuntaskan satu program sangatlah diperlukan menuju tercapainya tujuan secara efektif.

Bappeda, Dinas Pendidikan, Kanwil Departemen Agama dan Asisten Kesejahteraan Sosial SETDA Propinsi Banten merupakan unit-unit organisasi yang saling berhubungan satu sama lain. Serta mempunyai keterkaitan dalam upaya penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun di Propinsi Banten. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya unit-unit tersebut berjalan sendiri-sendiri, tetapi pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, atau sebagai sistem yang tidak terpisahkan satu sama lain. Untuk menjamin semua kegiatan

yang sudah terprogram oleh masing-masing unit organisasi menuju tercapainya tujuan yang diinginkan maka diperlukan satu koordinasi.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa koordinasi adalah proses penyerasian gerak dari seluruh potensi dan unit organisasi atau antar unit organisasi yang berbeda tugas dan fungsinya kearah terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan guna terwujudnya kesatuan arah dan tindakan maupun pencapaian tujuan organisasi secara efektif yang tercermin melalui kejelasan, wewenang dan tanggung jawab, pengawasan, komunikasi dan kemampuan pimpinan.

Untuk mengukur varied koordinasi ini akan ditetapkan empat kriteria teori yang dikemukakan oleh Farlan (dalam Kaloh, 1987:54) yaitu:

1. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab
2. Pengawasan dan pengamatan yang seksama
3. Fasilitas komunikasi yang efektif
4. Kemampuan pimpinan

2. Partisipasi masyarakat

Beberapa pakar telah mengidentifikasi unsur-unsur dalam partisipasi. salah satunya adalah Sulaiman (1985:39) yang menjabarkan unsur-unsur dalam partisipasi sebagai berikut:

1. Kepercayaan diri masyarakat
2. Adanya solidaritas dan integritas sosial dari masyarakat
3. Tanggung jawab dan komitmen masyarakat
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas dasar kekuatan sendiri,
5. Peranan dari pemimpin formal maupun non-formal dalam menggerakkan masyarakat
6. Prakarsa masyarakat atau perorangan dijadikan milik bersama
7. Adanya kepekaan dan tanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan, dan kepentingan bersama, adanya sikap musyawarah untuk mufakat dan menolong diri sendiri.

Sulaiman juga menggarisbawahi perlunya partisipasi berdasarkan fungsinya dalam hal-hal berikut:

1. Pengarah dan penggerak proses perubahan berencana
2. Pendidikan dan proses demokratisasi kehidupan masyarakat
3. Penghimpunan sumber dana dan daya dalam pembangunan
4. Pemupukan harga diri dan kepercayaan diri masyarakat
5. Pemeliharaan kesadaran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas sosial masyarakat
6. Pemerataan kegiatan pembangunan
7. Kontrol sosial terhadap sistem yang sedang berjalan.

Sebagai suatu konsep, dalam partisipasi, seperti yang dikutip oleh Khairuddin dari Hoofstede (1992:124-125), terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi
2. Partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok
3. Partisipasi merupakan tanggung jawab terhadap kelompok

Berdasarkan pengertiannya, partisipasi memiliki ciri-ciri tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Parwoto (1997):

1. Proaktif atau sukarela
2. Adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat dan akan terkena akibat dari kesepakatan tersebut
3. Adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut
4. Adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

3. Pelaksanaan

Apabila koordinasi bisa di implementasikan, maka setiap organisasi harus mampu melaksanakan tugasnya secara efektif, untuk itu M.C Laughin dalam Sutherland (1987:628) menyatakan bahwa "*Effectiveness refers to degree to which the organization performs its intended mission*". pelaksanaan merupakan

keberhasilan dalam mencapai sasaran atau juaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sutherland (1987:629) menjabarkan sebagai berikut:

1. *Effort is a criterion that ask wether or not given the validity of a specific approach the quantity of activity (often measured as inputs) is adequated to service the anticipate need or demand.*
2. *Impact criterion is the measure of how well the program accomplisher its out come objectives.*
3. *Adequacy of performance, this relates to wether or not the impact was sufficient to meet the need.*
4. *Cost effectiveness this is often subverted into a cost efficiency measure*
5. *Process refers to the way the program delivers its service.*

Kriteria efektivitas pelaksanaan organisasi berdasarkan konsepsi yang dikemukakan oleh Steers (1985:208-209) terdiri atas: (a) efektivitas organisasi harus dinilai terhadap tujuan yang bisa, (2) adanya hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat didalam maupun di luar organisasi, (c) adanya hubungan antara para yang diinginkan oleh pekerja dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Dengan demikian efektivitas organisasi berdasarkan konsepsi tersebut dapat diartikan sebagai keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan, yang mana dalam proses pencapaiannya tersebut melibatkan keseluruhan aspek organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Sementara itu Siagian (1991:151) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan adalah: penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut dapat diselesaikan. Dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan.

tidak sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut dapat diselesaikan. Dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan.

E. Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran diatas, penulis merumuskan hipotesis yaitu :

$$H_0 = P_{yx} \leq 0; \text{ Ho ditolak jika } F_{hitung} > F_{tabel}$$

$$H_1 = P_{yx} > 0; \text{ H1 diterima jika } F_{hitung} \leq F_{tabel}$$

Maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis yaitu : Ada kontribusi koordinasi dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun”, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Ada kontribusi koordinasi antar lembaga penyelenggara kependidikan terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

$$H_1 = P_{yx_1} > 0; \quad H_1 \text{ diterima jika } F_{hitung} \leq F_{tabel}$$

2. Ada kontribusi partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

$$H_1 = P_{yx_2} > 0; \quad H_1 \text{ diterima jika } F_{hitung} \leq F_{tabel}$$

3. Ada kontribusi koordinasi antar lembaga kependidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Wajar Dikdas 9 Tahun.

$$H_1 = P_{yx_3} > 0; \quad H_1 \text{ diterima jika } F_{hitung} \leq F_{tabel}$$

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang diajukan maka penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik korelasi menurut metoda kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara variabel, memecahkan melalui teori, dan menguji hipotesis yang akan diajukan.

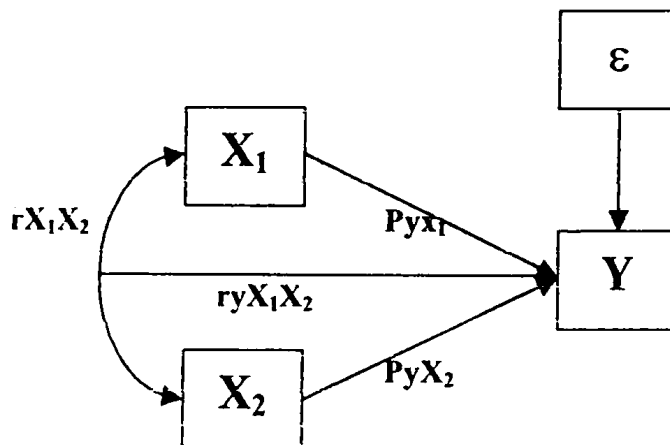
Desian ini ditujukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi koordinasi dan partisipasi masyarakat sebagai variabel bebas terhadap pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun sebagai variabel tak bebas.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah di Provinsi Banten, utamanya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Provinsi Banten. yang terdiri dari Asisten (1) Kesejahteraan Sosial, (2) Kanwil Departemen Agama, (3) Dinas Pendidikan, (4) Bapeda, (5) Masyarakat yang diwakili oleh (Pengusaha industri/pedagang, pengembang perumahan, Pariwisata, Media Massa LSM, Ketua Komite Sekolah, MUI, dan Kepala Desa.

H. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat dikemukakan pada gambar 1.1. sebagai berikut:



Gambar 1.1. Alur Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- X1 : Kontribusi koordinasi antar lembaga penyenggara kependidikan
- X2 : Kontribusi partisipasi masyarakat
- Y : Pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
- Pyx1 : Pengaruh variabel X₁ terhadap variabel Y
- Pyx2 : Pengaruh variabel X₂ terhadap variabel Y
- Rx1x2 : Hubungan variabel X₁ terhadap variabel X₂
- Ryx1x2 : Hubungan variabel X₁ terhadap variabel X₂
- ε : Variabel berpengaruh yang tidak diteliti
- R : Lambang statistik korelasi

